

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perundungan dan konflik sosial di lingkungan sekolah masih menjadi masalah serius yang menunjukkan belum optimalnya pengamalan nilai-nilai kemanusiaan dalam kehidupan peserta didik. Fenomena perundungan (*bullying*) yang terus terjadi mencerminkan rendahnya sikap saling menghargai, kurangnya empati, serta lemahnya internalisasi nilai kemanusiaan yang adil dan beradab sebagaimana terkandung dalam sila kedua Pancasila. Di Indonesia, perilaku agresif antar peserta didik tidak lagi dapat dipahami sebagai konflik interpersonal semata, melainkan sebagai persoalan sosial yang berdampak luas terhadap kesejahteraan psikologis siswa dan terciptanya iklim belajar yang aman dan kondusif. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara tujuan pendidikan nasional yang menekankan pembentukan karakter dengan realitas perilaku peserta didik di sekolah. Dalam konteks pendidikan karakter, perundungan sering dipandang sebagai indikator kegagalan sistem pendidikan dalam menanamkan norma sosial, etika, serta nilai kemanusiaan secara efektif kepada peserta didik yang dikemukakan oleh (Udjan & Setiawan, 2022) dalam Jurnal Pendidikan Karakter.

Fenomena perundungan di sekolah juga merupakan persoalan global yang menjadi perhatian serius komunitas internasional. Laporan UNESCO melalui *Behind the Numbers: Ending School Violence and Bullying* mengungkapkan bahwa hampir satu dari tiga pelajar di dunia (32%) pernah mengalami perundungan setidaknya sekali dalam satu bulan, baik dalam bentuk fisik, verbal, relasional, maupun siber. Perundungan terbukti berkorelasi kuat dengan penurunan prestasi akademik, meningkatnya risiko putus sekolah, serta gangguan kesehatan mental jangka panjang, termasuk depresi dan kecenderungan bunuh diri pada remaja (UNESCO, 2019). Organisasi Kesehatan Dunia (*World Health Organization*) juga menegaskan bahwa kekerasan dan perundungan di sekolah merupakan faktor risiko utama yang menghambat perkembangan sosial-emosional peserta didik serta mengganggu pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan (*Sustainable*

Development Goals), khususnya pada sektor pendidikan dan kesehatan mental remaja (WHO, 2021).

Dalam konteks Indonesia, permasalahan perundungan semakin kompleks seiring dengan perkembangan teknologi digital dan media sosial. Survei nasional yang dilakukan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA) bekerja sama dengan UNICEF Indonesia menunjukkan bahwa selain perundungan konvensional di lingkungan sekolah, perundungan siber (*cyberbullying*) mengalami peningkatan signifikan pada kelompok usia remaja sekolah menengah. Bentuk perundungan ini tidak hanya terjadi di ruang kelas, tetapi meluas ke ruang digital yang sulit diawasi oleh guru dan orang tua, sehingga memperbesar dampak psikologis bagi korban. Kondisi ini mempertegas bahwa perundungan bukan sekadar persoalan perilaku individual, melainkan fenomena struktural yang berkaitan dengan lemahnya internalisasi nilai kemanusiaan, empati, dan tanggung jawab sosial dalam sistem pendidikan.

Berdasarkan data Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) tahun 2024, tercatat lebih dari 2.300 kasus perundungan terjadi di lingkungan pendidikan dalam lima tahun terakhir, dengan 42% melibatkan siswa SMA/SMK. Sementara survei UNICEF (2023) mengungkapkan bahwa tiga dari sepuluh pelajar Indonesia pernah mengalami perundungan, baik fisik, verbal, sosial, maupun siber. Data ini menegaskan bahwa perundungan bukan sekadar kenakalan remaja, tetapi fenomena sistemik akibat lemahnya penanaman nilai moral, empati, dan karakter kemanusiaan di sekolah. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa dunia pendidikan masih menghadapi tantangan serius dalam mewujudkan lingkungan belajar yang aman dan beradab.

Perundungan (*bullying*) dalam konteks pendidikan tidak dapat direduksi sebagai konflik biasa antar peserta didik yang bersifat spontan dan temporer, melainkan merupakan manifestasi konflik sosial yang berakar pada relasi kuasa yang timpang di lingkungan sekolah. (Olweus, 1993) dalam *Bullying at School: What We Know and What We Can Do* mendefinisikan perundungan sebagai perilaku agresif yang dilakukan secara sengaja, berulang, dan ditandai oleh adanya

ketimpangan kekuatan antara pelaku dan korban. Ketimpangan tersebut tidak hanya bersumber dari kekuatan fisik, tetapi juga dari dominasi psikologis, status sosial, serta dukungan kelompok yang mengukuhkan posisi superior pelaku dalam struktur sosial sekolah. Kondisi ini menunjukkan bahwa perundungan merupakan konflik sosial yang bersifat struktural, di mana ketidaksetaraan relasi sosial dibiarkan berlangsung dan bahkan berpotensi direproduksi oleh budaya sekolah yang kurang responsif terhadap nilai keadilan dan kemanusiaan.

Dengan demikian, perundungan bukan sekadar pelanggaran disiplin individu, melainkan cerminan kegagalan institusional dalam membangun relasi sosial yang setara, beradab, dan berkeadilan, sehingga menuntut pendekatan pencegahan yang tidak hanya bersifat kuratif, tetapi juga transformatif melalui internalisasi nilai-nilai kemanusiaan. Secara teoretis, perilaku perundungan dapat dipahami melalui Teori Perkembangan Moral (*Moral Development Theory*) yang dikemukakan oleh Lawrence Kohlberg dalam karyanya *The Philosophy of Moral Development*. Kohlberg menjelaskan bahwa kemampuan individu dalam membedakan benar dan salah berkembang secara bertahap seiring dengan kematangan moralnya. Peserta didik yang belum mencapai tahap moral konvensional dan pascakonvensional cenderung menilai tindakan berdasarkan kepentingan pribadi, tekanan kelompok, atau relasi kekuasaan, sehingga lebih rentan melakukan tindakan yang melanggar nilai kemanusiaan, termasuk perundungan. Dalam konteks pendidikan, kondisi ini menunjukkan bahwa perundungan tidak semata-mata disebabkan oleh kenakalan siswa, melainkan berkaitan erat dengan proses perkembangan moral yang belum terbentuk secara optimal.

Perundungan juga berdampak signifikan terhadap kesejahteraan psikologis dan sosial siswa. Hasil penelitian dalam Jurnal Psikologi Pendidikan Indonesia tahun 2024 menunjukkan bahwa korban perundungan memiliki risiko 2,5 kali lebih tinggi mengalami stres akademik dan gangguan kecemasan dibandingkan siswa lainnya. Dampaknya meliputi penurunan motivasi belajar, hilangnya rasa aman, bahkan depresi. Karena itu, upaya pencegahan harus menekankan pendidikan nilai

kemanusiaan yang membangun empati, solidaritas, dan tanggung jawab sosial, bukan sekadar penegakan disiplin.

Pada praktiknya, perilaku perundungan di lingkungan sekolah sering kali dipersepsikan sebagai candaan atau dinamika sosial yang wajar di kalangan remaja. Pandangan tersebut mencerminkan rendahnya kesadaran moral dan empati terhadap sesama, sebagaimana dijelaskan dalam teori perkembangan moral Kohlberg. Ketika pendidikan nilai belum sepenuhnya diinternalisasikan dalam perilaku sehari-hari peserta didik, tindakan yang merendahkan martabat orang lain dapat terjadi tanpa disadari sebagai bentuk pelanggaran nilai kemanusiaan. Oleh karena itu, diperlukan upaya pendidikan yang tidak hanya menekankan aspek kognitif, tetapi juga membangun kesadaran moral dan sikap beradab. Hal inilah yang melandasi pentingnya penelitian mengenai implementasi nilai sila kedua Pancasila sebagai upaya membentuk perilaku peserta didik yang menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dan menolak segala bentuk perundungan di lingkungan sekolah.

Fenomena perundungan di lingkungan sekolah menengah atas masih menjadi persoalan serius dalam dunia pendidikan Indonesia. Perundungan kerap muncul dalam bentuk verbal, seperti ejekan dan penghinaan, maupun bentuk non-fisik seperti pengucilan sosial dan intimidasi psikologis antar siswa. Penelitian yang dimuat dalam Jurnal Pendidikan Sosiologi menunjukkan bahwa perundungan di sekolah terjadi akibat relasi kuasa yang timpang di antara siswa, lemahnya pengawasan guru, serta rendahnya kesadaran akan nilai saling menghormati dalam interaksi sosial di kelas. Kondisi ini berdampak langsung pada menurunnya rasa aman dan kenyamanan siswa di lingkungan sekolah, sehingga menghambat proses pembelajaran dan perkembangan kepribadian remaja secara optimal di kemukakan oleh (Virginia et al., 2024) dalam Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Indonesia.

Perundungan di lapangan masih terlihat dalam berbagai bentuk, termasuk verbal, fisik, dan relasional yang dapat mengganggu kesejahteraan psikososial siswa. Observasi awal di SMK Putra Nasional Cibodas menunjukkan bahwa tindakan perundungan tetap muncul meskipun telah ada aturan dan program

pendidikan karakter di sekolah, mulai dari ejekan, pengucilan sosial, hingga intimidasi halus antar siswa. Realitas ini menunjukkan adanya kesenjangan antara nilai-nilai ideal yang dikampanyekan oleh sekolah dengan praktik keseharian siswa yang masih terpapar budaya hegemonik yang menormalisasi perundungan sebagai bentuk “candaan” atau interaksi sosial. Kondisi tersebut mempertegas bahwa implementasi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan kelas masih memerlukan kajian empiris yang lebih mendalam. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan pendidikan nilai yang lebih substantif dan kontekstual, salah satunya melalui implementasi nilai sila kedua Pancasila sebagai landasan pembentukan sikap saling menghargai dan menolak segala bentuk perundungan.

Sejumlah penelitian membuktikan efektivitas pendidikan nilai dalam menekan perilaku perundungan. Hananda Saputra, Deni Normansyah, dan Miftah Khoerudin (2024) di SMAN 12 Bandung menemukan bahwa implementasi nilai “Kemanusiaan yang Adil dan Beradab” melalui pembelajaran kolaboratif dan budaya sekolah menurunkan kasus perundungan verbal hingga 37% dalam satu semester. Meski demikian, kajian tersebut belum menyoroti penerapan nilai-nilai Pancasila secara langsung dalam dinamika kelas. Oleh karena itu, penelitian ini penting untuk mengkaji implementasi nilai sila kedua Pancasila di SMK Putra Nasional Cibodas Lembang sebagai strategi konkret pencegahan perundungan.

Sejalan dengan temuan tersebut, penelitian studi kasus dengan pendekatan kualitatif yang dilakukan oleh (Dewi et al., 2023) di SMA Negeri 7 Bandung memberikan pemahaman mendalam tentang peran guru Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan dalam pencegahan perilaku bullying melalui penerapan nilai-nilai Pancasila. Penelitian yang menggunakan metode mix methods dengan pengumpulan data melalui observasi, wawancara mendalam dengan guru PPKn kelas X, dan penyebaran angket pada peserta didik ini mengungkap bahwa guru PPKn memiliki peranan yang sangat penting dan strategis dalam mencegah perilaku bullying di lingkungan sekolah. Temuan penelitian menunjukkan bahwa guru PPKn memiliki peranan khusus dalam penanaman sikap agar peserta didik tidak melakukan pelanggaran hukum baik di lingkungan sekolah maupun di luar sekolah, yang mencerminkan tanggung jawab profesi guru PPKn bukan hanya sebagai

pengajar mata pelajaran, tetapi juga sebagai pendidik karakter dan moral siswa. Strategi implementasi yang dilakukan guru PPKn di SMAN 7 Bandung meliputi beberapa pendekatan konkret: pertama, menyisipkan pemahaman mengenai *bullying* dan dampaknya terhadap martabat kemanusiaan dalam setiap pembelajaran yang diberikan kepada peserta didik, sehingga siswa tidak hanya memahami nilai-nilai Pancasila secara abstrak tetapi juga dapat mengaitkannya dengan fenomena riil yang mereka alami di lingkungan sekolah; kedua, menerapkan nilai religius yang menekankan pentingnya menghormati sesama sebagai makhluk ciptaan Tuhan ketiga, menanamkan nilai kebersamaan dan persatuan yang mengajarkan siswa untuk menghargai perbedaan dan membangun solidaritas antar sesama tanpa diskriminasi dan keempat, mengimplementasikan nilai demokrasi melalui kegiatan pembiasaan yang dapat dilakukan peserta didik setiap harinya, seperti musyawarah dalam menyelesaikan konflik, menghargai pendapat orang lain, dan memberikan kesempatan yang sama kepada setiap siswa untuk berpartisipasi dalam kegiatan kelas. Penelitian ini juga menemukan bahwa keberhasilan penerapan nilai-nilai Pancasila berpengaruh signifikan terhadap minimalisasi perilaku *bullying*, di mana perilaku *bullying* dapat berkurang secara bertahap bahkan berpotensi tidak terjadi lagi ketika nilai-nilai tersebut telah terinternalisasi dalam kesadaran dan perilaku siswa. Lebih lanjut, penelitian ini mengungkap bahwa selain upaya guru PPKn, SMAN 7 Bandung juga melakukan pendekatan sistematis dengan mensosialisasikan bahaya perilaku *bullying* melalui media visual seperti spanduk dan banner yang dipasang di berbagai sudut sekolah sebagai pengingat konstan bagi seluruh warga sekolah, serta mengajak seluruh komponen sekolah mulai dari kepala sekolah, guru, staf, hingga siswa untuk secara aktif melaporkan setiap percobaan maupun tindakan kekerasan yang terjadi sebagai bentuk partisipasi kolektif dalam menciptakan lingkungan sekolah yang aman dan beradab.

Namun, penelitian ini juga mengidentifikasi beberapa tantangan yang dihadapi dalam implementasi, seperti perbedaan tingkat pemahaman siswa terhadap nilai-nilai Pancasila, pengaruh lingkungan pergaulan di luar sekolah yang kadang bertentangan dengan nilai-nilai yang diajarkan, serta keterbatasan waktu guru PPKn untuk melakukan pendampingan individual terhadap siswa yang

memiliki kecenderungan perilaku *bullying*. Meskipun demikian, penelitian ini memberikan kontribusi penting dalam menunjukkan bahwa pendekatan pendidikan nilai melalui mata pelajaran PPKn, jika dilakukan secara konsisten dan didukung oleh kebijakan sekolah yang komprehensif, dapat menjadi strategi efektif dalam pencegahan bullying di tingkat sekolah menengah atas.

Perspektif yang lebih mendalam tentang implementasi nilai kemanusiaan Pancasila dalam konteks pencegahan bullying ditawarkan oleh penelitian kualitatif fenomenologis yang dilakukan oleh (Hidayati et al., 2023) di SMA Kesatrian 2 Semarang. Penelitian yang menggunakan pendekatan fenomenologik dengan teknik pengumpulan data melalui observasi partisipatif, wawancara mendalam, dan analisis dokumentasi ini bertujuan mendeskripsikan penerapan dan kendala implementasi nilai-nilai kemanusiaan yang adil dan beradab dalam mencegah perilaku bullying dari perspektif pengalaman hidup (*lived experience*) para aktor yang terlibat, baik guru, siswa, maupun pihak sekolah. Penelitian fenomenologis ini berusaha memahami esensi makna dari pengalaman subjektif para partisipan dalam menghadapi *fenomena bullying* dan upaya pencegahannya melalui internalisasi nilai kemanusiaan. Temuan penelitian mengungkap bahwa implementasi nilai kemanusiaan yang adil dan beradab di SMA Kesatrian 2 Semarang dilakukan melalui berbagai strategi yang terintegrasi dalam ekosistem sekolah pertama, melalui pembelajaran kontekstual di kelas yang tidak hanya menekankan aspek kognitif tentang nilai-nilai Pancasila, tetapi juga mendorong siswa untuk merefleksikan pengalaman mereka sendiri terkait sikap menghargai atau merendahkan orang lain dalam interaksi sosial sehari-hari; kedua, melalui pembiasaan perilaku dalam budaya sekolah seperti saling menyapa, menghormati yang lebih tua, dan membantu teman yang kesulitan, yang secara konsisten dimodelkan oleh guru dan dipraktikkan dalam rutinitas harian sekolah; ketiga, melalui program-program khusus seperti *peer counseling*, *character building camp*, dan diskusi kelas tentang isu-isu kemanusiaan yang relevan dengan kehidupan remaja kontemporer.

Analisis fenomenologis terhadap pengalaman siswa mengungkap transformasi pemahaman yang terjadi secara bertahap dari pemahaman awal yang

cenderung melihat nilai kemanusiaan sebagai konsep abstrak dan normatif yang “dipaksakan” oleh guru, menuju pemahaman yang lebih personal dan eksistensial tentang pentingnya menghormati martabat setiap individu sebagai bagian dari kemanusiaan universal yang mereka yakini. Wawancara mendalam dengan siswa yang pernah menjadi korban *bullying* mengungkap pengalaman traumatik mereka dan bagaimana program anti-bullying berbasis nilai kemanusiaan memberikan ruang bagi mereka untuk menyuarakan pengalaman, mendapatkan dukungan emosional, dan bahkan terlibat dalam proses edukasi teman-teman mereka tentang dampak bullying terhadap martabat kemanusiaan. Sementara itu, wawancara dengan siswa yang pernah menjadi pelaku menunjukkan bahwa mereka awalnya tidak menyadari bahwa tindakan mereka seperti mengejek penampilan fisik teman, mengucilkan siswa tertentu dari kelompok, atau melakukan intimidasi verbal merupakan bentuk pelanggaran terhadap nilai kemanusiaan, karena perilaku tersebut telah dinormalisasi dalam kultur pergaulan remaja sebagai "candaan" atau “hal biasa”. Namun, melalui proses refleksi mendalam yang difasilitasi guru dan konselor sekolah, para pelaku mulai memahami konsekuensi moral dari tindakan mereka dan berupaya mengubah perilaku dengan meminta maaf kepada korban serta berkomitmen untuk tidak mengulangi tindakan serupa. Penelitian ini juga mengidentifikasi berbagai kendala dalam implementasi nilai kemanusiaan sebagai strategi pencegahan *bullying* pertama, pengaruh kultur *peer group* yang kadang lebih kuat daripada nilai-nilai yang diajarkan di sekolah, sehingga siswa mengalami dilema antara mempraktikkan nilai kemanusiaan atau mengikuti norma kelompok sebaya mereka; kedua, keterbatasan kompetensi sebagian guru dalam mengintegrasikan pendidikan nilai ke dalam pembelajaran mata pelajaran non-PPKn, yang menyebabkan pendidikan nilai hanya terbatas pada mata pelajaran tertentu ketiga, kurangnya konsistensi penerapan sanksi terhadap pelaku *bullying*, yang kadang membuat siswa mempertanyakan keseriusan sekolah dalam menegakkan nilai kemanusiaan dan keempat, minimnya keterlibatan orang tua dalam mendukung penguatan nilai kemanusiaan di rumah, sehingga terjadi diskontinuitas antara nilai yang diajarkan di sekolah dengan praktik di lingkungan keluarga.

Meskipun menghadapi berbagai kendala tersebut, penelitian ini menemukan bahwa ketika nilai kemanusiaan yang adil dan beradab benar-benar diinternalisasi dan dipraktikkan secara konsisten oleh seluruh warga sekolah bukan hanya siswa tetapi juga guru, kepala sekolah, dan staf terjadi transformasi kultur sekolah dari yang semula permisif terhadap *bullying* menjadi kultur yang secara aktif menolak segala bentuk perilaku yang merendahkan martabat kemanusiaan. Temuan krusial dari penelitian fenomenologis ini adalah bahwa pencegahan bullying yang efektif memerlukan pendekatan yang tidak hanya berfokus pada perubahan perilaku individual siswa, tetapi juga pada transformasi kultur sekolah secara menyeluruh, di mana nilai-nilai kemanusiaan yang adil dan beradab benar-benar menjadi roh yang menghidupi seluruh aspek kehidupan sekolah.

Perundungan sebagai bentuk konflik sosial di lingkungan sekolah menunjukkan terjadinya penyimpangan relasi sosial yang tidak berlandaskan prinsip keadilan dan kemanusiaan. Konflik ini bukan hanya lahir dari perilaku individual peserta didik, tetapi juga dari lemahnya internalisasi nilai bersama yang seharusnya mengatur interaksi sosial di ruang pendidikan. Dalam konteks tersebut, Pancasila sebagai dasar negara memiliki peran strategis tidak hanya sebagai pedoman normatif, tetapi juga sebagai kerangka etis dan sosial dalam mengelola serta mencegah konflik sosial. Sila kedua Pancasila, “Kemanusiaan yang Adil dan Beradab,” menegaskan pentingnya penghormatan terhadap martabat manusia, kesetaraan dalam relasi sosial, serta sikap adil dan beradab dalam menyelesaikan perbedaan. Nilai-nilai ini secara substantif bertentangan dengan praktik perundungan yang beroperasi melalui dominasi, eksklusi sosial, dan kekerasan simbolik maupun fisik. Oleh karena itu, implementasi nilai sila kedua Pancasila dalam pendidikan karakter menjadi pendekatan transformatif yang tidak hanya menekan gejala konflik sosial, tetapi juga menyasar akar persoalan dengan membangun kesadaran moral, empati, dan tanggung jawab sosial peserta didik sebagai prasyarat terciptanya lingkungan sekolah yang aman, inklusif, dan berkeadaban (Ali et al., 2023).

Kajian hubungan antara pendidikan karakter berbasis nilai Pancasila dan upaya pencegahan perundungan. Sebagai contoh, studi tentang internalisasi sila

kedua di SMAN 12 Bandung menunjukkan bahwa program pendidikan karakter, pelatihan guru, serta kegiatan ekstrakurikuler berhasil meningkatkan pemahaman dan sikap positif siswa terhadap nilai kemanusiaan yang adil dan beradab, yang kemudian membantu menciptakan lingkungan sekolah yang lebih aman (Saputra et al., n.d.). Namun, kajian tersebut belum secara rinci mengulas bagaimana nilai sila kedua benar-benar diimplementasikan dalam dinamika kelas sebagai strategi pencegahan perundungan yang kontekstual dan *holistic*.

Penelitian oleh Deeva Putri Salsabilla dan Raden Roro Nanik Setyowati (2024), mengkaji peran guru Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) dalam memperkuat karakter integritas siswa untuk menciptakan lingkungan kelas yang anti-bullying di SMAN 1 Rengel. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa integrasi nilai-nilai karakter Pancasila melalui peran aktif guru meliputi penguatan nilai integritas, motivasi siswa, kerja kelompok, dan pendekatan non-diskriminatif berkontribusi terhadap pembentukan iklim kelas yang lebih menghargai sesama dan menekan kecenderungan perilaku agresif antar siswa. Meskipun demikian, penelitian ini juga menemukan hambatan berupa faktor internal siswa seperti rasa superioritas, serta tantangan eksternal seperti kurangnya perhatian siswa terhadap pelajaran PPKn, yang perlu diatasi untuk meningkatkan efektivitas pendidikan karakter. Temuan ini relevan untuk memahami bagaimana praktik pembelajaran berbasis nilai Pancasila dapat berperan dalam upaya pencegahan perundungan di sekolah menengah atas

Kesenjangan lain dalam kajian sebelumnya terlihat pada fokus penelitian yang lebih umum pada pendidikan karakter tanpa menelaah secara khusus kohesi antara nilai sila kedua Pancasila dan praktik interaksi sosial siswa dalam situasi nyata di kelas. Kebanyakan riset terdahulu masih bersifat deskriptif tentang manfaat pendidikan nilai, tetapi belum mengungkap secara mendalam tantangan implementatif yang dihadapi guru, siswa, dan pemangku kepentingan sekolah dalam mewujudkan nilai kemanusiaan yang adil dan beradab sebagai pencegah perundungan sehari-hari. Hal ini menunjukkan kurangnya kajian empiris yang mengaitkan nilai teoritis Pancasila dengan perilaku sosial siswa dalam konteks interaksi kelas yang kompleks (Rachmadanti et al., 2024).

Berdasarkan keterbatasan kajian tersebut, penelitian ini dirancang untuk mengeksplorasi implementasi nilai-nilai sila kedua Pancasila sebagai upaya pencegahan perundungan di SMK Putra Nasional Cibodas Lembang. Tujuan utama penelitian ini adalah memahami bagaimana nilai “Kemanusiaan yang Adil dan Beradab” diaktualisasikan dalam praktik pembelajaran, interaksi sosial siswa, dan kebijakan sekolah. Secara teoretis, penelitian ini diharapkan memperkaya pemahaman tentang pendidikan karakter berbasis Pancasila di tingkat menengah atas secara praktis, memberikan rekomendasi strategis untuk sekolah dalam merancang intervensi pencegahan perundungan yang kontekstual, berkelanjutan, dan berlandaskan nilai dasar bangsa.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah peneliti uraikan maka rumusan masalah dalam penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana jenis perundungan yang terjadi di SMK Putra Nasional Cibodas dalam konteks interaksi sosial siswa, serta faktor-faktor yang melatarbelakanginya?
2. Bagaimana implementasi nilai-nilai sila kedua Pancasila dalam proses pembelajaran dan budaya sekolah sebagai upaya pencegahan perundungan di SMK Putra Nasional Cibodas?
3. Faktor-faktor apa saja yang menjadi pendukung dan penghambat dalam implementasi nilai-nilai sila kedua Pancasila sebagai upaya pencegahan perundungan dan konflik sosial pada peserta didik SMK Putra Nasional Cibodas?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan Penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis jenis perundungan yang terjadi di SMK Putra Nasional Cibodas dalam konteks interaksi sosial siswa, sebagai dasar untuk memahami dinamika hubungan peserta didik di lingkungan sekolah.

2. Untuk menganalisis faktor-faktor yang melatarbelakangi implementasi nilai sila kedua Pancasila sebagai upaya pencegahan perundungan dan konflik sosial pada peserta didik di SMK Putra Nasional Cibodas.
3. Selain itu, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara mendalam implementasi nilai-nilai sila kedua Pancasila, yaitu *Kemanusiaan yang Adil dan Beradab*, dalam proses pembelajaran dan budaya sekolah sebagai upaya pencegahan perundungan di SMK Putra Nasional Cibodas.
4. Tujuan lain dari penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi faktor-faktor pendukung dan penghambat implementasi nilai-nilai sila kedua Pancasila dalam mencegah perundungan, sehingga dapat memberikan gambaran yang komprehensif mengenai tantangan dan peluang dalam penerapan nilai kemanusiaan di lingkungan sekolah menengah kejuruan.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memperkaya khazanah keilmuan dalam bidang pendidikan kewarganegaraan, pendidikan karakter, dan studi Pancasila, khususnya yang berkaitan dengan implementasi nilai sila kedua Kemanusiaan yang Adil dan Beradab dalam konteks pencegahan perundungan di sekolah. Hasil penelitian ini dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai bagaimana nilai-nilai kemanusiaan tidak hanya dipahami secara normatif, tetapi juga diaktualisasikan dalam interaksi sosial siswa di lingkungan pendidikan formal.

Selain itu, penelitian ini berkontribusi dalam mengembangkan konsep implementasi nilai Pancasila yang lebih kontekstual dan aplikatif, terutama pada level mikro, yaitu kelas dan budaya sekolah. Temuan penelitian ini diharapkan mampu melengkapi keterbatasan penelitian terdahulu yang masih cenderung menempatkan pendidikan karakter berbasis Pancasila sebagai wacana konseptual, dengan menghadirkan gambaran empiris mengenai proses internalisasi nilai sila kedua dalam kehidupan siswa sehari-hari. Dengan demikian, penelitian ini dapat

menjadi rujukan teoretis bagi kajian lanjutan yang mengaitkan nilai Pancasila dengan pembentukan perilaku sosial yang beradab dan berkeadilan.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi pihak sekolah, khususnya guru dan pengelola pendidikan, dalam merancang dan mengembangkan strategi pembelajaran serta budaya sekolah yang lebih berorientasi pada penguatan nilai kemanusiaan. Temuan penelitian ini dapat membantu sekolah dalam mengidentifikasi praktik-praktik implementasi nilai sila kedua Pancasila yang efektif sebagai upaya pencegahan perundungan di lingkungan kelas.

Bagi guru, penelitian ini dapat menjadi acuan dalam mengintegrasikan nilai kemanusiaan yang adil dan beradab ke dalam proses pembelajaran dan interaksi dengan siswa, baik melalui metode pembelajaran, keteladanan, maupun pengelolaan kelas. Sementara itu, bagi siswa, hasil penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran akan pentingnya sikap empati, saling menghargai, dan keadilan dalam membangun hubungan sosial yang sehat. Selain itu, penelitian ini juga dapat dimanfaatkan oleh pembuat kebijakan pendidikan sebagai dasar penguatan program pendidikan karakter berbasis Pancasila yang lebih implementatif dan berkelanjutan di sekolah menengah atas.

E. Sistematika Skripsi

Adapun sistematika skripsi yang merupakan urutan dalam proses penulisan skripsi bagi peneliti sebagai berikut:

1. BAB I Pendahuluan: Bab ini berisi uraian mengenai latar belakang masalah yang mendasari dilaksanakannya penelitian tentang perundungan di lingkungan sekolah dan pentingnya implementasi nilai-nilai sila kedua Pancasila sebagai upaya pencegahan. Selain itu, bab ini memuat identifikasi masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, serta sistematika penulisan skripsi.

2. BAB II Landasan Teori : Bab ini menguraikan landasan teoretis yang menjadi dasar dalam penelitian, yang meliputi teori perkembangan moral, konsep perundungan (bullying) di lingkungan sekolah, konsep dan nilai-nilai sila kedua Pancasila Kemanusiaan yang Adil dan Beradab, pendidikan karakter berbasis Pancasila, kerangka berpikir, serta penelitian terdahulu yang relevan.
3. BAB III Metode Penelitian : Bab ini menjelaskan metode penelitian yang digunakan, meliputi jenis dan pendekatan penelitian, lokasi dan waktu penelitian, subjek dan objek penelitian, teknik pengumpulan data, instrumen penelitian, teknik analisis data, serta prosedur penelitian.
4. BAB IV Hasil Penelitian dan Pembahasan : Bab ini memaparkan hasil penelitian yang diperoleh di lapangan, meliputi gambaran umum lokasi penelitian, deskripsi hasil penelitian mengenai implementasi nilai-nilai sila kedua Pancasila sebagai upaya pencegahan perundungan, serta pembahasan hasil penelitian yang dikaitkan dengan landasan teori dan penelitian terdahulu.
5. BAB V Kesimpulan dan Saran: Bab ini berisi kesimpulan yang disusun berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, serta saran yang ditujukan kepada pihak sekolah, pendidik, peserta didik, dan peneliti selanjutnya terkait upaya pencegahan perundungan berbasis nilai-nilai Pancasila.
6. Daftar Pustaka: Berisi daftar referensi dan sumber pustaka yang digunakan dalam penyusunan skripsi.
7. Lampiran: Berisi dokumen pendukung penelitian, seperti instrumen penelitian, pedoman wawancara, data tambahan, dan dokumentasi penelitian.